



**BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BPPKAD  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

---

**2018**

A decorative floral graphic in the bottom right corner, featuring a large, stylized flower and swirling lines.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transfaran, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di BPPKAD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja BPPKAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Temanggung, 2019

An.KEPALA BPPKAD  
Sekretaris,

**Sri Elfiati, S.E., S.Hi., M.M.**

Pembina TK I

NIP. 19620814 198607 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
Gambaran Umum Organisasi .....	8
Tugas pokok dan fungsi .....	9
Permasalahan Utama .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	
Rencana Strategis .....	11
Indikator Kinerja Utama .....	12
Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	16
A. Komitmen Pimpinan .....	17
B. Pengukuran Kinerja .....	17
C. Pelaksanaan Agenda Reformasi .....	18
D. Capaian kinerja organisasi .....	20
E. Capaian kinerja sasaran .....	22
F. Realisasi Anggaran .....	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	65
<b>LAMPIRAN I</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
<b>LAMPIRAN II</b> Laporan pengukuran kinerja s.d triwulan IV tahun 2018	
<b>LAMPIRAN III</b> Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2017 (Foto gambar sertifikat/ piala/ Penyerahan dll)	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	4
Tabel 2.1 .....	24
Tabel 3.1 .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### **A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **B. Gambaran Umum Organisasi**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
- 4) Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
- 5) Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
- 6) Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
- 8) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
- 9) Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
- 10) Penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah.
- 11) Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
- 12) Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 13) Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah.
- 14) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 15) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.

- 16) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
- 17) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Adapun Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- d. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- e. Bidang Pengelolaan data dan Penetapan Pendapatan;
- f. Bidang Pengendalian, & Penagihan;
- g. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan
- h. Bidang Pengelolaan Aset;
- i. Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan, dan
- j. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakn, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan obyek/subyek pajak daerah, pelaksanaan kegiatan perencanaan target pendapatan daerah, pembinaan dan teknis operasional, pemeriksaan ke lokasi obyek/subyek pajak daerah.

4. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, serta pengolahan dan analisa data pajak daerah, pelaporan pajak daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, penyetoran hasil penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, pelaporan serta realisasi pendapatan daerah.
6. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan anggaran.
7. Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengecualian barang milik daerah.
8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatusahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

### **C. Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut

adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 50 orang dengan rincian:

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,  
Pangkat dan Golongan  
**Urusan Keuangan**  
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualifikasi Pendidikan		
	A SMA	8	
	b. Sarjana Muda (D-III)	3	
	c. S-1	18	
	d S-2	10	
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	0	
	b Gol II	4	
	c Gol III	26	
	d Gol IV	9	
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	6	
	c Eselon IV	10	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional Khusus	5	
	f Jabatan Fungsional Umum	18	
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	

Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,  
Pangkat dan Golongan  
Urusan Pendukung  
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	1	
	b SMP	1	
	c SMA	1	
	D Sarjana Muda (D-III)	0	
	e. S-1	3	
	f S-2	4	
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	3	
	c Gol III	3	
	d Gol IV	3	
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	1	
	c Eselon IV	3	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional Khusus	0	
	f Jabatan Fungsional Umum	5	
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	

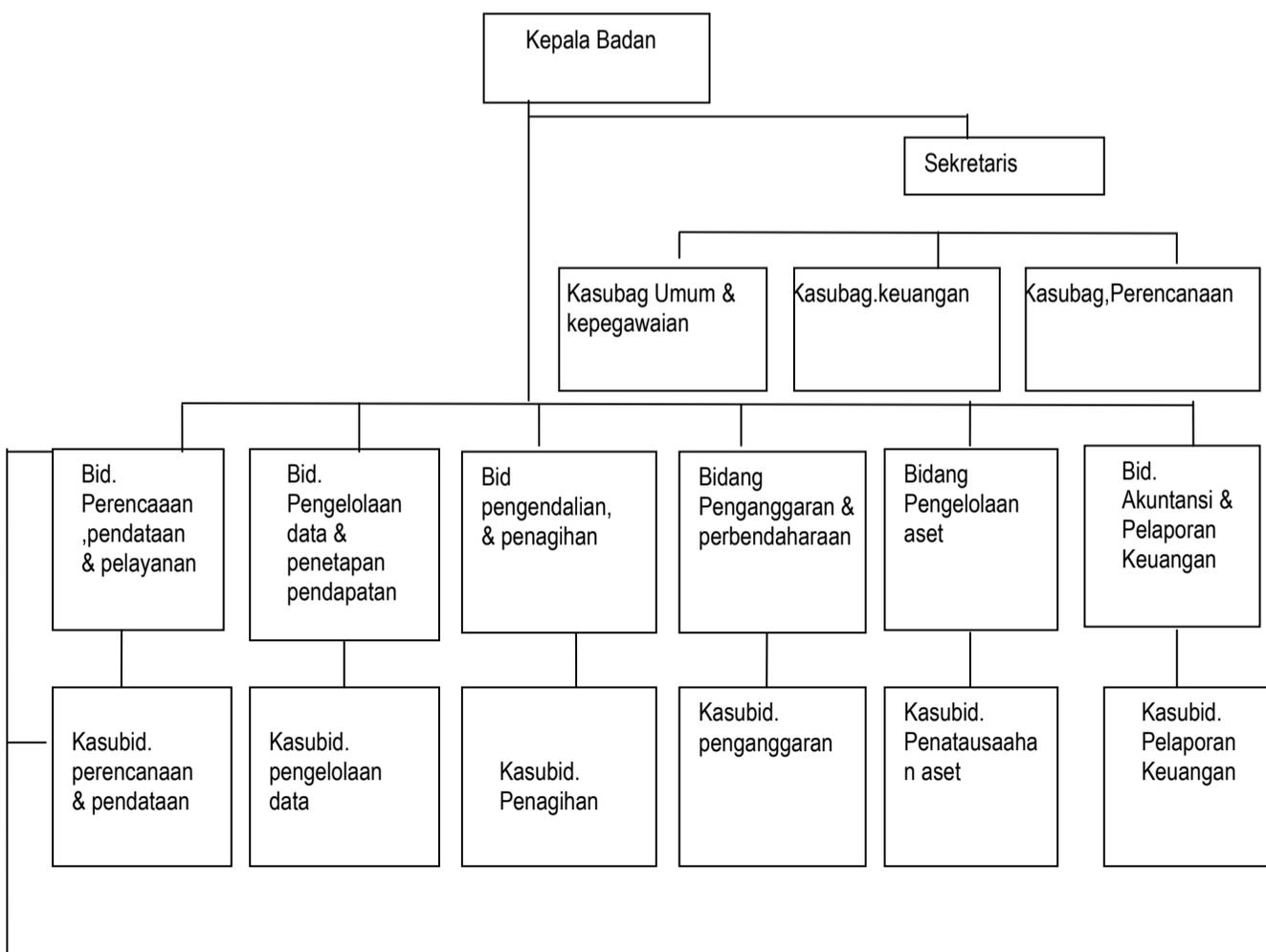
Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang

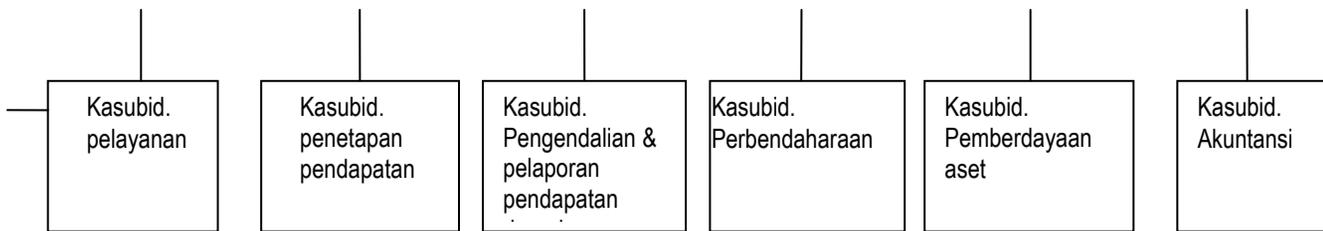
Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi dan Tata Laksana DPPKAD**

Struktur organisasi BPPKAD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :





## B. Isu Strategis BPPKAD

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, BPPKAD secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi perencanaan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, kerumahtagaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

Secara singkat BPPKAD memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan upaya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah ;

Adapun permasalahan utama BPPKAD yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan keuangan daerah;
2. SDM dimasing-masing perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami akuntansi keuangan dan belum lancar dalam mengerjakan aplikasi penatausahaan dan aplikasi keuangan perangkat daerah;
3. Kurangnya koordinasi intern di perangkat daerah dalam mengelola keuangan (koordinasi antara PA/kuasa PA, PPTK,Pejabat penatausahaan keuangan)
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
5. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;

6. Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset belum didukung bukti kepemilikan yang sah;
7. Belum sepenuhnya sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi;
8. Masih banyak aturan tentang pajak daerah yang sudah kadaluarsa;
9. NJOP PBB-P2 jauh dibawah harga pasar;
10. Belum adanya SDM penilai dalam menetapkan nilai bumi dan bangunan dalam PBB-P2
11. Belum terdapat perkiraan harga pasar sebagai dasar ketetapan dan pengenaan BPHTB
12. Kurangnya petugas pajak daerah baik dari segi jumlah maupun fungsinya.

### **C. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyajian LKJIP BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

#### **1.) Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

#### **2.) Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **4.) Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2014-2018 visi BPPKAD adalah:

**“MENJADI SKPKD YANG BERSIH, TERTIB, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”**

Visi ini mengandung harapan ;

1. SKPKD yang Bersih yaitu DPPKAD selaku SKPKD merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih disemua aspek pelaksanaan pemerintahan. Dan dapat menciptakan kondisi yang bersih dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Transparan merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dan terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan proses melalui sistem informasi.
3. Akuntabel merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi/tugas yang telah diemban
4. Berorientasi pada pelayanan publik merupakan sebuah kondisi yang berorientasi pada kepentingan publik bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sehingga kinerja pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi keinginan
5. masyarakat yaitu terciptanya pelayanan publik yang prima.

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas juga telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

**“Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transfaran, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”**

**TABEL 2.1  
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

<b>VISI: MENJADI SKPKD YANG BERSIH, TERTIB, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>

1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transfaran, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Pemerintahan yang bersih, Transfaran, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatnya tertib administrasi aset pemerintah daerah

### A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
-----	--------	---------	-----------

1.	Pemerintahan yang bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran penatuserahan SKPD terhadap Total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun
			Rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah
			Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
			Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
		Meningkatnya tertib administrasi aset pemerintah daerah	Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, Dokumen RKPD Tahun 2018 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2018, serta dokumen APBD Tahun 2018. BPPKAD Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2018	Rumus	SUMBER DATA
1	2	3		4	7	8
1	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	1	Persentase anggaran penatusahaan SKPD terhadap Total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun	25%	Anggaran penatusahaan SKPD dibagi Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun x 100	BPPKAD
2	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	1	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	0,87 %	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah potensi pendapatan daerah	BPPKAD
3	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	.....	BPPKAD
4	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	1	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	9	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Anggaran Pendapatan Daerah kali 100 %	BPPKAD
5	Meningkatnya tertib administrasi aset pemerintah daerah	1	Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD	80%	Jumlah SKPD yang melaporkan aset daerah yang benar dan tepat waktu dibagi Jumlah SKPD	BPPKAD

## D. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:



### 1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.4 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah

### 2. **SIKAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.

### 3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.2 Sistem perencanaan daerah

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

**BPPKAD** Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja **BPPKAD** Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

### A. Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di **BPPKAD** Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai **BPPKAD** telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung **HEBAT** (Handarbeni, Excellence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

### B. Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di **BPPKAD** kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai **BPPKAD**.
- c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi **BPPKAD** dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **C. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama **BPPKAD** yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

#### **Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO.</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik

4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### D. Capaian Kinerja sasaran strategis

**BPPKAD** Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi **BPPKAD** Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak **2** sasaran dan **5** indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran **BPPKAD** Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	4
2	Sangat baik		
3	Baik	1	1
4	Cukup		
5	Kurang	-	
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>5</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 2 sasaran hanya 1 sasaran yang masih dalam kategori “memuaskan” dan 1 indikator yang masih dalam kategori “sangat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Sasaran**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan & pengelolaan keuangan daerah	4	100	memuaskan
2	Meningkatnya tertib administrasi aset	1	98	Sangat baik
Jumlah		5	97	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran dan 5 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama BPPKAD tahun 2018 dapat tercapai 97 atau kategori “Sangat baik”.

### E. Evaluasi Kinerja sasaran strategis

Pada tahun 2018, BPPKAD telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis BPPKAD, terdapat 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

#### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	9
1. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	%	0,87	0,99	107	0,87	14,56	103,55	80
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	kriteria	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP

3.	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	9	17,26	100	9	14,98	105,12	86
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>102,3</b>			<b>102,89</b>	

Ket. R = Realisasi CK = Capaian Kinerja

- ❖ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **102,89** % dengan predikat **"memuaskan"**. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator tersebut telah mencapai target, bahkan 2 indikator telah melebihi dari target yang ditetapkan.
- ❖ Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 102,89 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 102,3 %, dikategorikan memuaskan.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp461.949.428.170 atau 96,25% dari total Pagu sebesar Rp. 8.896.101.142,-. Realisasi keuangan sebesar 87,64 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102,89 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.
- ❖ Analisa capaian sasaran Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah
  - ✓ Capaian kinerja pada indikator Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2018 mencapai dan melebihi target yang ditentukan .
  - ✓ Capaian indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian dari hasil audit BPK-RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut kami sampaikan data capaian laporan keuangan sebagaimana table berikut:

Tabel 3.5  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018**

No	Tahun	Predikat
1	2013	WTP
2	2014	WTP
3	2015	WTP
4	2016	WTP
5	2017	WTP

Sumber: BPPKAD Temanggung

- ✓ Capaian indikator Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mencapai target yang ditetapkan. Berikut kami sampaikan data realisasi PAD tahun 2018

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah		Ket.
		2017	2018	
1	Pajak Hotel	217.378.698	248.404.566	
2	Pajak Restoran	152.666.662	233.306.220	
3	Pajak Hiburan	16.206.050	27.422.200	
4	Pajak Reklame	590.393.584	568.466.160	
5	Pajak Penerangan jalan	15.459.868.944	16.732.755.112	
6	Pajak Parkir	70.295.950	82.303.650	
7	PBB-P2	12.926.054.468	13.354.560.268	
8	BPHTB	8.593.088.330	9.012.090.184	
9	Pajak Air Tanah	265.325.408	142.066.110	
Jumlah		38.291.278.094	40.401.374.470	

**Keterangan: sumber data BPPKAD Kab. Temanggung**

**\*Tahun 2018 Data realisasi masih Unaudited**

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018 baru mencapai Rp40.401.374.470 (103,55%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp38.291.278.094.

- ❖ Analisis **penyebab keberhasilan/ kegagalan** atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - ✓ Keberhasilan/kegagalan sebagai berikut:
    1. Adanya efisiensi anggaran belanja langsung SKPD
    2. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektifitas, efisien, transparan dan akuntabel
    3. Ada sebagian wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak
    4. Memaksimalkan fungsi petugas pajak dalam penagihan/pemungutan pajak daerah
    5. Adanya prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diantaranya program aplikasi komputer dan rangka menumjung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

7. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
8. Memberdayakan barang daerah secara tertib, efektif, efisien, dan ekonomis
9. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses kepemilikan aset daerah
10. Upaya mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Temanggung

✓ Kegagalan sebagai berikut:

1. Anggaran yang telah ditetapkan masih mengalami kendala sehingga diadakan revisi anggaran
  2. Belum diketahui potensi Pendapatan asli Daerah (PAD) yang mendekati kondisi riil
  3. NJOP PBB jauh dibawah harga pasar
  4. Belum adanya SDM penilai dalam menetapkan nilai bumi dan bangunan dalam PBB-P2
  5. Masih adanya peraturan daerah pajak maupun retribusi daerah yang tidak sesuai perkembangan dimasyarakat
  6. Kesadaran wajib pajak rendah terutama rumah makan, hotel, kantin dll
  7. Pengelolaan keuangan daerah belum optimal
  8. Kurang koordinasi intern diperangkat daerah dalam pengelolaan barang milik daerah
  9. Masih banyak perangkat daerah tidak tepat waktu dalam melaporkan aset
  10. Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset
- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 102,89 % di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2018 dengan target 100 % **telah tercapai** di tahun 2018.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya tertib administrasi aset Pemerintah Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	9
1. Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD	%	75	77	100	80	77	98	80

Rata-rata capaian kinerja				100			98	
---------------------------	--	--	--	-----	--	--	----	--

Keterangan: sumber data BPPKAD Kab. Temanggung

- ❖ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98 % dengan predikat ”sangat baik”.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada sasaran ini mengalami penurunan sebesar 2 %
- ❖ **Untuk mencapai sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000. Dan terealisasi Rp74.564.053 Sehingga ada efisiensi sebesar Rp60.435.947**
- ❖ **Kegagalan pada sasaran ini disebabkan:**
  1. Laporan dari perangkat daerah terlambat
  2. Kurangnya koordinasi intern dalam perangkat daerah
  3. SDM yang ada di perangkat daerah kurang memahami aplikasi SIMBADA
  4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
  6. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;

**Berikut kami sampaikan data aset Pemerintah Kabupaten Temanggung**

**Tabel 3.7  
Data asset Pemkab temanggung**

No	Aset	2017	2018
1	Aset Tetap	3.904.807.733.445	n/a
2	Aset lancar	141.306.799.448	n/a
3	Aset lainnya	61.470.943.360	n/a

Keterangan: sumber data BPPKAD Kab. Temanggung

- ❖ **Pada sasaran ini didukung oleh proram peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan:**
  1. **Pengelolaan Barang milik daerah Dengan capaian tertibnya penatausahaan barang milik daerah yaitu Perangkat daerah, UPTD, sekolahan dan Puskesmas**
  2. **Pembinaan pejabat pengurus barang dengan capaian tertibnya administrasi dan sensus barang milik daerah yaitu Perangkat daerah, UPTD, sekolahan dan Puskesmas**
  3. **Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah dengan capaian terlaksananya pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah yaitu 70 perangkat daerah**
  4. **Lelang tanah bekas bengkok kelurahan dengan capaian tercapainya lelang tanah eks bengkok dan tanah pemda sebanyak 13 kelurahan**

5. **Pemeliharaan SIMBADA dengan capaian terpeliharanya aplikasi SIMBADA sebanyak 70 perangkat daerah**
  6. **Pensertifikatan tanah pemerintah daerah dengan capaian terpenuhinya sertifikasi tanah pemda sebanyak 50 bidang**
- ❖ **Jika dibandingkan dengan target RPJMD maka sasaran meningkatnya tertib administrasi aset tercapai.**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	9
1. Persentase aset tanah pemerintah yang bersertifikat	%	85.000 .000	18.538. 680	21,81	58.000 .000	18.724. 040	32,28	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>21,81</b>			<b>32,28</b>	

Keterangan: sumber data BPPKAD Kab. Temanggung

- ❖ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **32,28 %** dengan predikat ” **tidak tercapai** ”.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada sasaran ini mengalami kenaikan sebesar 10,47. %
- ❖ **Capaian kinerja pada tahun 2018 tidak tercapai dikarenakan apa ada program nasional yang membebaskan pensertifikatan tanah tanpa dikenakan biaya sehingga capaian kinerja tahun 2018 tidak tercapai.**

**Tabel 3.7**  
**Pensertifikatan tanah Pemkab temanggung**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>bidang</b>
<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>64</b>
<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>2018</b>	<b>30</b>

Keterangan: sumber data BPPKAD Kab. Temanggung

- ❖ **Pada sasaran ini didukung oleh proram Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Dengan kegiatan:**

**1. Kegiatan Pensertifikatan tanah pemerintah daerah Dengan capaian persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja (80,95%) dan persentase pemanfaatan aset disatuan kerja (98,33%)**

**Jika dibandingkan dengan target RPJMD tidak tercapai**

❖ **Untuk mencapai sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.000.000 Dan terealisasi Rp18.724.040 Sehingga ada efisiensi sebesar Rp39.275.960 (dikarenakan ada program nasional)**

**3. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	9	
1	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	25	22,00	100	25	16	100	74
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>				<b>100</b>			<b>100</b>		

Keterangan: sumber data BPPKAD Kab. Temanggung

- ❖ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 16 % dengan predikat **"Tercapai "**.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada sasaran ini mengalami penurunan sebesar 6 %
- ❖ **Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2018.**
- ❖ **Pada sasaran ini didukung oleh proram pelayanan administrasi perkantoran**
- ❖ **Pada sasaran ini didukung oleh proram peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
- ❖ **Jika dibandingkan dengan target RPJMD tercapai**
- ❖ **Untuk mencapai sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 722.958.000 Dan terealisasi Rp.554.324.478 Sehingga ada efisiensi sebesar Rp168.633.522**

## F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp8.896.101.142 Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp3.848.139.940,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp3.197.506.994

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Realisasi Anggaran per kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	( % ) Realisasi Kegiatan	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	<b>2</b>	<b><i>Program perencanaan pembangunan daerah</i></b>	<b>153.500.000</b>	<b>116.380.500</b>	<b>75</b>
	a	Penyusunan KUA dan PPAS	150.000.000	113.465.500	<b>75</b>
	b	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	3.500.000	2.915.000	<b>83</b>
	<b>3</b>	<b><i>Program pelayanan administrasi perkantoran</i></b>	<b>722.958.000</b>	<b>554.324.478</b>	<b>76</b>
	a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250.000.000	196.555.372	<b>78</b>
	b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	161.308.000	119.043.435	<b>73</b>
	c	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	25.884.250	<b>86</b>
	d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	16.951.100	<b>84</b>

	e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	16.831.500	<b>84</b>
	f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000	2.136.000	<b>79</b>
	g	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	56.472.800	<b>75</b>
	h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.550.000	71.924.021	<b>89</b>
	i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	7.000.000	4.040.000	<b>57</b>
	j	Jasa Pelayanan perkantoran	76.400.000	44.486.000	<b>58</b>
	<b>4</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>692.732.000</b>	<b>617.470.550</b>	<b>89</b>
	a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	226.773.477	219.700.460	<b>96</b>
	b	Pengadaan peralatan gedung kantor	109.000.000	103.465.500	<b>94</b>
	c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.658.523	148.542.500	<b>98</b>
	d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.000.000	108.615.290	<b>83</b>
	e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22.050.000	8.374.000	<b>37</b>
	f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.250.000	22.593.800	<b>93</b>
	g	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	30.000.000	6.179.000	<b>20</b>
	<b>5</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>32.900.000</b>	<b>32.680.000</b>	<b>99</b>
	a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.900.000	32.680.000	<b>99</b>
	<b>6</b>	<b>Prpgram peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>6.844.011.142</b>	<b>6.127.505.109</b>	<b>89</b>

	a	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	450.000.000	379.349.284	<b>84</b>
	b	Pengelolaan administrasi gaji	197.500.800	113.591.731	<b>57</b>
	c	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	56.644.000	53.737.564	<b>94</b>
	d	Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi pajak daerah	236.321.402	199.632.473	<b>84</b>
	e	Pengelolaan keuangan daerah	3.109.000.000	2.987.932.242	<b>96</b>
	f	Penyusunan perda dan perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung	879.044.000	787.453.327	<b>89</b>
	h	Pendataan Massal SOSMIOP Objek/Subjek PBB-P2	661.501.900	654.753.400	<b>98</b>
	i	Pengelolaan administrasi pajak daerah	209.999.040	184.623.070	<b>87</b>
	j	Penelusuran, Penagihan, dan Penanganan Permasalahan pajak daerah	40.000.000	38.133.250	<b>95</b>
	n	Percetakan SPPT PBB-P2	99.000.000	97.174.715	<b>98</b>
	o	Penelitian, Pengesahan RKA dan DPA	150.000.000	45.768.000	<b>30</b>
	p	Inventarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.000.000	45.067.750	<b>90</b>
	q	Penyusunan Buku Potensi Pendapatan Asli Daerah	100.000.000	95.076.000	<b>95</b>
	r	Pemutakhiran Obyek Pajak Daerah	-	-	
	<b>7</b>	<b><i>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</i></b>	<b>200.000.000</b>	<b>190.540.100</b>	<b>95</b>
	a	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100.000.000	97.490.100	<b>97</b>

	b	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	100.000.000	93.050.000	<b>93</b>
	<b>8</b>	<b><i>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i></b>	<b>90.000.000</b>	<b>66.972.401</b>	100
	a	Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PNS, Non PNS (bagi PTT dan Tenaga Kontrak)	90.000.000	66.972.401	<b>74</b>
Meningkatnya tertib administrasi aset pemerintah daerah	a	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	355.000.000	317.777.500	<b>89</b>
Meningkatnya tertib administrasi aset pemerintah daerah	b	Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000	37.870.750	<b>37</b>
Meningkatnya tertib administrasi aset pemerintah daerah	c	Pemeliharaan SIMBADA	15.000.000	15.000.000	<b>100</b>
	d	Pengelolaan barang milik daerah	135.000.000	74.564.053	<b>55</b>
	1	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kegiatan :			
	a	Fasilitasi Sewa Tanah Bengkulu Kelurahan	60.000.000	50.445.000	<b>40</b>
	b	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	100.000.000	40.679.040	<b>59</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>8.896.101.142</b>	<b>7.796.997.178</b>	<b>87</b>



## BAB IV

# PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **BPPKAD** Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum **BPPKAD** Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak **2 (dua)** sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap **2 (dua)** sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa **3 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, 1 sasaran di atas 90 % dikategorikan sangat baik**. Sedang 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria wajar tanpa pengecualian Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari **2 sasaran dan 5 (lima)** indikator dikategorikan sangat baik (**100 %**). Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari **2 sasaran** sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra **BPPKAD** 2014-2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 dapat dipenuhi sesuai dengan

harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.